



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 58);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 58) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 58
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2023 memerlukan perubahan agar hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Kab. Garut tahun 2019-2024 yang kemudian di implementasikan dalam Renstra Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan termasuk kedalam misi 3 Kabupaten Garut yaitu: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Proses pembangunan yang telah berjalan, program pokok Dinas Perhubungan tahun anggaran 2023 berfokus untuk mengatasi minimnya sektor sarana prasarana penunjang bidang perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam usaha mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan, kabar baiknya adalah dengan memperoleh dana bantuan khusus keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pembanguna terminal type C Limbangan.

Pada pelaksanaannya proses penyusunan Perubahan Renja 2023 telah melewati berbagai tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun tahapan – tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja; dan
3. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Selanjutnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 telah berpedoman terhadap rancangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab. Garut Tahun 2023 serta atas dasar hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan yang matang dan terukur demi tercapainya sasaran kinerja akhir sesuai RPJMD Perubahan 2019-

2024 dan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan 2019-2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan 2023 agar sejalan dengan target pembangunan yang harus dijalankan pada tahun anggaran 2023.
- 2) Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan perubahan anggaran tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Hasil Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023

evaluasi pelaksanaan Renja Dishub sampai dengan triwulan II tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Dishub yang mencakup capaian kinerja dan ringkasan kinerja pencapaian sasaran Renstra Dishub. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dishub, serta *review* terhadap rancangan perubahan RKPD.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan perangkat daerah beserta kebutuhan anggaran/ pagu indikatif.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

2.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Pada tahun anggaran 2023 telah diaplikasikan kedalam 3 (tiga) Program, 17 kegiatan dan 31 Sub kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Program Kegiatan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah sebesar 29,77% dari pagu total sebesar Rp. 88.688.520.395,- dengan realisasi anggaran sebesar 26.402.974.088,-.

Berdasarkan realisasi program kegiatan yang telah dilaksanakan apabila di ukur dari realisasi kinerja, seluruh program kegiatan belum mencapai target karena baru berjalan sampai dengan triwulan II. Apabila dikaitkan dengan realisasi anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi capaian realisasi sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun faktor – faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja adalah :

1. Adanya beberapa kali perubahan PPK/ PPTK kegiatan karena terjadi rotasi jabatan;
2. Khusus untuk pembangunan terminal type C Limbangan mengalami kendala pada waktu pelaksanaan yang diperkirakan tidak untuk mencukupi;
3. Untuk pembangunan terminal type C guntur masalah yang dihadapi adalah lokasi terminal dalam Perda RTRW masuk dalam lingkup terminal type A yang pengelolaannya berada di pihak Kementerian Perhubungan;
4. Program kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar target penyelesaiannya sampai dengan bulan Desember 2023;

Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra dengan belum tercapainya target kinerja program kegiatan tahun anggaran 2023 adalah :

1. Capaian target Renstra belum dapat diukur secara pasti karena proses pelaksanaan program kegiatan masih berjalan;
2. Proses evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya sedikit terhambat;
3. Menghambat terhadap proses penerapan skala prioritas terhadap program kegiatan agar pembangunan dari sektor perhubungan lebih merata.

Atas dasar uraian diatas, maka Dinas Perhubungan mengambil kebijakan/ tindakan yang berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun anggaran 2023 dengan cara :

1. Menjaga konsistensi pelaksanaan capaian target kinerja agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara intens terhadap pejabat pengelola kegiatan yang bertanggung jawab terhadap capaian kinerja;
3. Terus mengupayakan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang telah tersedia agar tetap terjaga kondisinya;
4. Memprioritaskan pengadaan perlengkapan dan sarana pelayanan publik;
5. Melayani keluhan masyarakat melalui media sosial terutama yang berkaitan dengan PJU dan perlengkapan jalan lainnya;
6. Terus menerus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Lebih jelasnya, realisasi program kegiatan dituangkan pada form evaluasi hasil renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2. 1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peng ang gun g Jaw ab	Ket era ngan	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I												II
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Dae rah Pen ang gun g Jaw ab	Ket era ngan
										I		II		III		IV											
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		Penumpang Type C	aan terminal penumpang type C	n	00			38																			
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	6	Dokumen	237.500.000	3	143.171.000	-	-									3	143.171.000	50	60,28	Dis hub				
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang terbangun	4	Unit	10.500.000.000	-	-	-										-	-	-	0,00	Dis hub				
		Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2	Unit	6.000.000.000	-	-	1	3.984.686.438	-							0	0,00	-	-	-	0,00	Dis hub			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				Laporan		3	295.94 8.500	1	199.6 85.00 0	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5	Laporan 500.00 0.000	3	295.94 8.500	1	199.6 85.00 0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3	295.948. 500	60	59, 19	Dis hub				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Laporan 500.00 0.000	3	295.94 8.500	1	199.68 5.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	3	295.948. 500	60	59, 19	Dis hub				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Pengguna Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
				6	La po ra n	3	1.497. 979.50 0	12	1.471. 901.6 00	6	1.262. 322.3 00	-	-	6	1.262. 322.3 00	83 ,3 3	66,0 6		42	2.760.30 1.800	70	86 ,1 2				
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	60	La po ra n	36	1.497.979.500	12	1.471.901.600	6	1.262.322.300	-	-	6	1.262.322.300	83,33	66,06	42	2.760.301.800	70	86,12	Dis hub			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4	Unit	2	443.572.700	1	1.196.901.600	1	1.188.144.300			1	1.188.144.300	100	99,27	3	1.631.717.000	75	23,300	Dis hub			
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60	Dokumen	36	814.210.900	12	75.000.000	6	74.178.000			6	74.178.000	50	98,90	42	888.388.900	70	59,23	Dis hub			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	60	La por an 205.00 0.000	-	-	-	-							-	-	-	-	-	0, 00	Dis hub				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	54	Unit 800.00 0.000	27	240.19 5.900	11	200.00 0.000		-	11				11	-	100	0,00	38	240.195. 900	70	30, 02	Dis hub		
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	4950	titik 32.350 .000.000	5130	6.962. 080.379	2.737	35.08 8.151.650	545	959.4 03.693		824.8 60.300		-	-	545	1.784. 263.993	29,48	31,57	5.675	8.746.34 4.372	115	27, 04	Dis hub	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
			Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.	Jumlah PJU yang terbangun dan terpeliharaan	4950	titik 19.500.000	2970	3.610.962.700	1.937	33.916.103.500	125	287.127.000		794.430.000			125	1.081.557.000	6,45	3,19	3.095	4.692.519.700	63	24,06	Dis hub		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpeliharaan	3600	Titik 12.850.000	2160	3.351.117.679	800	1.172.048.150	420	672.276.693		30.430.300			420	702.706.993	52,5	59,96	2.580	4.053.824.672	72	31,55	Dis hub		
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	60	Laporan 9.410.900	36	5.030.586.727	12	1.058.653.400	6	648.767.100		203.765.100		-	6	852.532.200	33,3	60,73	42	5.883.118.927	70	62,51	Dis hub		
			Penataan Manajemen dan Rekayasa	Jumlah Laporan Penataan Manajemen	10	Laporan 3.986.000	6	2.451.072.880	2	390.517.400	1	266.269.500		15.521.000			1	281.790.500	50	72,16	7	2.732.863.380	70	68,56	Dis hub		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peng guna ng Jaw ab	Ket era ngan
									I		II		III		IV										
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
		Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	en dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																						
		Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1767	Unit 3.923.900.000	1060	2.060.151.547	39	605.148.000		376.928.000		182.761.500			-	559.689.500	0	92,49	1.060	2.619.841.047	60	66,77	Dis hub	
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi	2	Dokumen 926.000.000	2	149.284.300	-	-							-	-	0,00	2	149.284.300	100	16,12	Dis hub		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peng guna ng Jaw ab	Ket era ngan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				1	0	6	2.955.134.700	2	66.790.435	-	-	-	-	-	-	0	0,00	6	2.955.134.700	60	225,41						
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10	1.311.000.000	6	2.955.134.700	2	66.790.435	-	-	-	-	-	-	0	0,00	6	2.955.134.700	60	225,41	Dis hub					
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan	5	510.000.000	3	130.059.800	1	78.549.170	1	66.249.000	-	-	-	1	66.249.000	100	84,34	4	196.308.800	80	38,49	Dis hub				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				4	Dokumen	2	234.05 5.000	1	81.87 8.000	-	-	-	-	-	-		0	0,00	2	234.055. 000	50	36 ,0 1		
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	4	Dokumen	2	234.05 5.000	1	81.87 8.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	2	234.055. 000	50	36 ,0 1	Dis hub		
		Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Dokumen	2	234.05 5.000	1	81.878 .000	-	-	-	-	-	-	0	0,00	2	234.055. 000	50	36 ,0 1	Dis hub		
		PENGEL OLAAN PELAYA RAN	Persentase Sarana Pelayaran yang Laik Layar	9 4, 4 4	%		258.25 7.086	1	36.15 5.000	17.79 6.500	4.405. 000	-	-	1	22.20 1.500	10 0	61,4 1	1	280.458. 586	1	46 ,7 4	Dis hub		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Dae rah Pen ang gun g Jaw ab	Kete ra nga n
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
				La po ra n	0.000	3	258.25 7.086	1	36.15 5.000	17.79 6.500	4.405. 000	-	-	1	22.20 1.500	10 0	61,4 1	4	280.458. 586	80	46 ,7 4						
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut	5	La po ra n	600.00 0.000	3	258.25 7.086	1	36.15 5.000	17.79 6.500	4.405. 000	-	-	1	22.20 1.500	10 0	61,4 1	4	280.458. 586	80	46 ,7 4	Dis hub				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	5	La por an	600.00 0.000	3	258.25 7.086	1	36.155 .000	17.79 6.500	4.405. 000			1	22.201 .500	10 0	61,4 1	4	280.458. 586	80	46 ,7 4	Dis hub				

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peng guna ng Jaw ab	Ket era ngan									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.													
			Perencanaan Perangkat Daerah	aan Perangka t Daerah	n																															
			Administ rasi Keuangan Perangka t Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, jasa tenaga perhubu ngan dan tenaga administ rasi	1 7 2 0	Or an g 00	70.495 .600.0 00	1 0 3 2	43.952 .916.2 58	430	17.72 0.431. 572		6.399. 005.3 66		2.552. 644.9 48		-		-	43 0	8.951. 650.3 14	10 0, 00	66,4 0	1.4 62	52.904.5 66.572	85	75 ,0 5	Dis hub								
			Penyedia an Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia an Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	5	Do ku me n	10.735. 600.00 0	3	38.974. 846.25 8	1	3.848. 600.00 0		1.625. 700.0 00		2.010. 944.94 8					-	3.636. 644.94 8	0, 00	94,4 9	3	42.611.4 91.206	60	39 6, 92	Dis hub								
			Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	8 1 0	Or an g	59.760. 000.00 0	4 8 6	4.978.0 70.000	162	13.871 .831.5 72		4.773. 305.3 66		541.70 0.000					16 2	5.315. 005.36 6	10 0, 00	38,3 2	648	10.293.0 75.366	80	17 ,2 2	Dis hub								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
			n ASN	0	0			108	127.127.500	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	163.263.800		7,64	Dis hub					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	954.000.000	2	163.263.800										2	163.263.800	67	17,11	Dis hub					
		Pendidikan dan Pelatihan Berdasar Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	Orang	620.000.000	14	-	80.000.000	-						0,00	0,00	14	-	58	0,00	Dis hub					

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang 414.000	120	-	100	47.127.500	-							0,00	0,00	120	-	60	0,00	Dis hub			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0 150.000.000	0	-												-	-		0,00	Dis hub			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Laporan 2.902.699.700	36	1.417.794.362	12	592.490.560	3	354.358.825	3	63.510.000		-	-	6	417.868.825	50,00	59,97	42	1.835.663.187	70	63,24	Dis hub	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Pengguna Jawab	Keterangan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Pa ket	90.000. 000	3	62.499. 100	1	41.572 .100	1	15.34 6.600		5.095. 000					1	20.441 .600	10 0, 00	49,1 7	4	82.940.7 00	80	92 ,1 6	Dis hub	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Pa ket	1.183.5 72.200	3	400.17 0.963	1	75.000 .000	1	72.33 8.025		1.680. 000					1	74.018 .025	10 0, 00	98,6 9	4	474.188. 988	80	40 ,0 6	Dis hub	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Pa ket	458.37 1.000	6	297.67 1.090	2	205.00 0.000		156.0 10.00 0	1	4.380. 000					1	160.39 0.000	50 ,0 0	78,2 4	7	458.061. 090	70	99 ,9 3	Dis hub	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Dae rah Pen ang gun g Jaw ab	Ket era ngan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	37.000.000	3	19.700.000	1	10.000.000	900.000	500.000					-	1.400.000	0,00	14,00	3	21.100.000	60	57,03	Dis hub			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	206.286.000	3	114.585.650	1	40.576.260	14.925.000	8.145.000					1	23.070.000	10,00	56,86	4	137.655.650	80	66,73	Dis hub			
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	927.470.500	3	523.167.559	12	220.342.200	94.839.200	43.710.000					6	138.549.200	50,00	62,88	42	661.716.759	70	71,35	Dis hub			
			Pengadaan barang milik daerah penunjan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Unit	9.310.000.000	1	767.638.000	53	4.497.420.600	-	-	2	259.513.000	-	-	-	-	23	259.513.000	43,40	26,09	20	1.027.151.000	68	11,03	Dis hub	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peng guna ng Jaw ab	Ket era ngan		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
		n Lainnya	Banguna n Lainnya yang Disediaka n																								
		Pengadaa n Sarana Prasaran a dan Prasaran a Gedung Kant or atau Banguna n Lainnya yang Disediaka n	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran a Gedung Kant or atau Banguna n Lainnya yang Disediaka n	1	Un it	120.00 0.000	1	-												1	-	100	0, 00	Dis hub			
		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	6 5	La po ran	144.63 3.688. 800	3 9	64.419 .874.2 97	13	23.09 6.035. 000	4	10.59 6.165. 143	3	2.122. 216.7 91	-	-	7	12.71 8.381. 934	53 ,8 5	67,6 2	46	77.138.2 56.231	71	53 ,3 3	Dis hub		
		Penyedia an jasa pelayana n umum kant or	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum	5	La por an	49.233. 688.80 0	3	64.274. 103.15 5	1	96.035 .000	1	71.27 9.800		5.820. 000			1	77.099 .800	10 0, 00	80,2 8	4	64.351.2 02.955	80	13 0, 71	Dis hub		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Pengguna ng Jawab	Keterangan									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.													
			Kantor yang Disediakan																																	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	La por an	95.400.000.000	36	145.771.142	12	23.000.000.000	3	10.524.885.343	3	2.116.396.791					6	12.641.282.134	50,0	54,96	42	12.787.053.276	70	13,40	Dis hub								
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	419	Un it	1.435.692.000	251	820.042.540	53	82.434.350	14	38.147.022	9	12.100.000	-	-			23	50.247.022	43,40	60,95	274	870.289.562	65	60,62	Dis hub								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penggunaan Jawab	Keterangan
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				Un it																						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	419	Unit 540.692.000	251	272.887.840	53	82.434.350	14	38.147.022	9	12.100.000			23	50.247.022	43,40	60,95	274	323.134.862	65	59,76	Dis hub	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	45.000.000	0	249.158.700											-	249.158.700		55,369	Dis hub		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	850.000.000	0	297.996.000											-	297.996.000		35,06	Dis hub		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		44,28								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																		(sangat								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Peng guna ng Jaw ab	Ket era ngan												
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.														
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.														
																			rendah)																			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :																																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):																																						

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian target belum mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik gedung/ bangunan. Hal tersebut karena pada proses pelaksanaan program kegiatan mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Status kepemilikan terminal type C Guntur masih belum dilengkapi dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan lahan;
2. Pembangunan terminal type C Limbangan dalam proses pelaksanaan (terkendala adanya pergantian PPK beberapa kali);
3. Adanya pergeseran belanja konsultansi Amdal lalin ke belanja konsultansi perencanaan reuiu DED terminal type C Limbangan;
4. Untuk ijin pembangunan harus menyediakan lahan 2 kali lipat sebagai pengganti;
5. Pembangunan PJU dari anggaran BKK Provinsi mengalami pergeseran standar harga sehingga pelaksanaannya tertunda/ tidak sesuai jadwal;
6. Proses pembangunan gedung kantor Dinas mengalami kendala pada proses tender yang dilaksanakan oleh pihak ULP Kab. Garut.

Atas kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kab. Garut terus berupaya secara optimal dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Terus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, terutama dengan ULP Kab. Garut agar proses pelaksanaan dapat terkawal secara kontinyu;
2. Menginstruksikan kepada seluruh pejabat di Dinas Perhubungan terutama dengan PPK agar proses pelaksanaan dapat dikerjakan sesuai dengan arahan;
3. Berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan proses pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BKK Provinsi Jawa Barat;
4. Untuk program kegiatan yang anggarannya bersumber dari bantuan keuangan provinsi Jawa Barat terus diupayakan terutama dengan proses perijinan pembangunan terminal type C Limbangan, sementara untuk pembangunan PJU telah

memasuki tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PJU;

- Pembangunan PJU yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi Jawa Barat telah memasuki tahap kontrak.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2023

Analisis kinerja pelayanan tahun 2023 sampai dengan triwulan II meliputi Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023 serta implementasi atas Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Adapun hasil analisis yang diperoleh tergambar dalam uraian sebagaimana berikut dibawah ini :

2.2.1 Capaian kinerja Perubahan RPJMD

Dinas Perhubungan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 yang merupakan urusan Perhubungan. Adapun hasil yang dapat dicapai sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Garut Tahun 2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja			
			Target	Realisasi/Tahun	Persentase Capaian/Tahun	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Unit	158.712		0,00	
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,084		0,00	
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	14.117	3968	28,11	X
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	3	2	66,67	X
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,0847		0,00	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja			
			Target	Realisasi/Tahun	Persentase Capaian/Tahun	Kriteria
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	6,92	39,097	564,99	X
7	Pemasangan Rambu-Rambu	%	89	55	61,80	X
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	kend/Km	0,059	0,062	105,08	√
9	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Org	1.873.053	341.836	18,25	X
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun	Org/Thn	1.873.053	341.836	18,25	X

Dari tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 indikator IKK yang diukur sampai dengan triwulan II hanya 1 indikator yang mencapai target karena indikator rasio panjang jalan merupakan kondisi eksisting. Adapun 9 indikator lainnya yang tidak mencapai target disebabkan faktor – faktor sebagai berikut dibawah ini :

1. Data capaian belum bisa diukur sepenuhnya karena masih baru berjalan setengah semester;
2. Pemulihan ekonomi dari sektor transportasi belum sepenuhnya membaik yang disebabkan efek dari pandemi *covid 19* yang baru berlalu;
3. Terdapat beberapa indikator yang hanya bisa di ukur ketika tahun pengukuran telah berakhir;

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Adapun langkah – langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mendorong seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk segera melakukan percepatan terkait dengan proses pengadaan barang jasa dalam upaya penyediaan sarana prasarana dan

- fasilitas perhubungan;
2. Menginventarisir kembali sarana prasarana yang tidak bisa di sediakan pada tahun anggaran 2023 agar bisa kembali di ajukan pada perubahan anggaran tahun 2023 atau pada tahun anggaran selanjutnya;
 3. Mengoptimalkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK Dinas Perhubungan agar pada pelaksanaan tahun selanjutnya realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.2.2 Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra Dinas

Perhubungan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2023 diperoleh data – data sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.3
Kinerja Pencapaian Perubahan Renstra 2019-2024

No.	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022	Hasil Tahun 2023 s/d triwulan II	Target Tahun 2023	Tingkat Capaian 2023 s/d triwulan II thd Target (%)	Tercapai / Tidak **)	Target Akhir Renstra
1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (%)	80,88%	63,07%	90,69%	69,54	√	97,22%
2	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	74,32%	52,10%	85,99%	60,59	√	99,12%
3	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi (%)	66,01%	29,07%	81,96%	35,47	X	97,92%
4	Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan (%)	68,58%	29,10%	85,07%	34,21	X	100%

No.	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2022	Hasil Tahun 2023 s/d triwulan II	Target Tahun 2023	Tingkat Capaian 2023 s/d triwulan II thd Target (%)	Tercapai / Tidak **)	Target Akhir Renstra
5.	Tingkat laik layar sarana pelayaran (%)	88,89%	33,22%	94,44%	35,18	X	100%

Ket : √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

3.1.1.1 Rincian Kinerja

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023 yang diukur berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2023 meliputi 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator. Dari 5 (lima) indikator tersebut baru 2 indikator yang mencapai target, sementara sisanya 3 indikator belum mencapai target.

Berikut uraian rincian kinerja berdasarkan sasaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

1) **Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan.**

Sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan memiliki 2 (dua) indikator dengan deskripsi penjelasan capaian sebagai berikut :

1. Capaian indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan adalah 63,07% dari target sebesar 90,69% atau dengan peresentase capaian sebesar 69,54%. Hal ini disebabkan karena :
 - a. Sampai dengan triwulan II belum seluruhnya kegiatan selesai;
 - b. Adanya kendala teknis berupa pergantian PPK karena rotasi jabatan;
 - c. Adanya sub kegiatan yang masa pelaksanaannya sampai dengan bulan Desember 2023.
4. Indikator Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan capaian kinerja sebesar 52,10% dari target 85,99% dengan

persentase capaian sebesar 60,59%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya kendala teknis berupa pergantian PPK beberapa kali pada sub kegiatan pembangunan PJU karena rotasi jabatan;
- b. Adanya sub kegiatan yang masa pelaksanaannya sampai dengan bulan Desember 2023;
- c. Pengadaan PJU yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan khusus Provinsi Jawa Barat sudah berkontrak, akan tetapi belum bisa dianggap selesai karena proses pekerjaan masih berlangsung.

2) **Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan Sosialisasi/ Penyuluhan Keselamatan Perhubungan**

1. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi baru mencapai hasil sebesar 29,07% dari target 81,96% dengan persentase capaian sebesar 35,47%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan karena menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan III;
- b. Kondisi ekonomi yang masih belum pulih di sektor transportasi sehingga tingkat perijinan angkutan umum belum sesuai dengan yang diharapkan.

2. Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan target 85,07% dengan realisasi 29,10% atau persentase capaian sebesar 34,21%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Kegiatan yang berpengaruh terhadap capaian kinerja belum sepenuhnya selesai sampai dengan triwulan II;
- b. Masih ada sub kegiatan yang belum dilaksanakan dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

3. Tingkat laik layar sarana pelayaran memiliki target sebesar 94,44% dengan realisasi sebesar 33,22% atau dengan persentase capaian sebesar 35,8%. Hal ini disebabkan karena :

- a. Pelaksanaan peningkatan laik layar sarana pelayaran ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023;
- b. Adanya pergantian pengelola sub kegiatan karena rotasi jabatan.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sementara itu isu strategis Dinas Perhubungan berkenaan dengan penyusunan program kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2023 adalah :

- a. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem angkutan umum yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan IPTEK dalam penyelenggaraan Transportasi;
- d. Masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan keselamatan lalu lintas
- e. Pembangunan terminal type C mengalami kendala baik secara teknis maupun non teknis.

Apabila dikaitkan dengan Visi Misi kepala Daerah, Dinas Perhubungan masuk ke dalam misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan tujuan Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator tujuannya adalah Indeks daya saing infrastruktur (%). Salah satu faktor penunjang yang berhubungan dengan infrastruktur ada di Dinas Perhubungan berupa penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan. Artinya ada keselarasan antara misi kepala daerah dengan program kerja Dinas Perhubungan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa bila program kerja Dinas Perhubungan tidak terealisasi maka secara langsung akan menghambat atau berpengaruh terhadap pencapaian misi Kepala Daerah.

Kaitan dengan catatan strategis Kinerja Dinas Perhubungan yang terkait dengan pencapaian Misi III Mewujudkan Kualitas Infrastruktur Yang Memadai Serta Lingkungan Yang Sehat, Aman, Dan Nyaman telah ditindak lanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan antara lain :

- a. Terkait dengan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor di Kabupaten Garut, yang ditunjukkan dengan kepadatan dan kemacetan hampir pada setiap ruas jalan terutama pada jam-jam sibuk, maka pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah antisipatif dengan melakukan kajian yang komprehensif terkait dengan sistem transportasi dan lalu lintas, serta pula harus diikuti dengan penertiban parkir-parkir pada bahu jalan agar tidak semakin mempersempit ruang jalan yang dapat digunakan berlalu lintas.
- b. Terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai masih banyak Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, maka DPRD memberikan catatan khusus agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya penanganan pju secara efektif dan efisien. selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki data base yang akurat serta *mapping* dari keberadaan titik-titik pju tersebut lengkap dengan data kondisinya, sehingga langkah-langkah pemeliharaan dan pengawasannya dapat dilakukan secara terjadwal dan tepat sasaran.

Langkah yang diambil Dinas Perhubungan berkenaan dengan catatan strategis tersebut diatas adalah :

1. Terkait kepadatan dan kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu, terutama pada jam masuk serta pulang kerja dan sekolah, kami telah melakukan beberapa langkah penanganan diantaranya melakukan koordinasi secara intensif dalam melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan jajaran Kepolisian Resort Garut serta melibatkan SKPD dan stakeholder terkait baik pengaturan yang bersifat permanen maupun insidental sebagai upaya menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas di wilayah Kabupaten Garut. Namun hal ini belum seiring dengan kesadaran masyarakat yang belum menaati ketentuan yang berlaku terutama sekali pada saat minimnya petugas sehingga tidak seluruh areal dapat diawasi langsung oleh petugas;

2. Keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, kami telah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan memperbaiki maupun mengganti spare part yang rusak. Jumlah PJU yang telah terpasang mencapai lebih dari 7.000 titik memerlukan waktu, tenaga serta sarana dan anggaran pemeliharaan yang tidaklah kecil sehingga upaya perbaikan belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini perlu dimaklumi, disamping lokasi yang tersebar di 42 Kecamatan juga disebabkan jumlah usia pakai komponen dan kondisi iklim Kabupaten Garut yang mempengaruhi umur ekonomis komponen PJU. Namun demikian hal ini menjadi perhatian kami untuk melakukan perbaikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, catatan strategis dan permasalahan dilapangan maka diperoleh rumusan untuk rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023 adalah dengan memprioritaskan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan pelayanan angkutan dan keselamatan perhubungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Untuk menjaga keselarasan antara Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan program kegiatan yang di ajukan dalam Rancangan Perubahan RKPD dengan program

kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 tidak ada perbedaan atau selisih antara Rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Berikut di bawah ini adalah tabel review rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan hasil analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				92.085.046.564	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				92.085.046.564
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	49.355.192.271	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	49.355.192.271
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Penganggaran Evaluasi Kinerja	7 Laporan	21.130.120	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Penganggaran Evaluasi Kinerja	7 Laporan	21.130.120

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.130.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.130.120
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi	430 orang	16.938.554.141	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi	430 orang	16.938.554.141
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 orang	13.089.954.141	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 orang	13.089.954.141
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.848.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.848.600.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina	108 Orang	127.127.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina	108 Orang	127.127.500
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.000.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	47.127.500	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	47.127.500
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	592.490.560	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	592.490.560
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.572.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.572.100
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.576.260	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.576.260

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	205.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	205.000.000
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.342.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220.342.200
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	50 unit	4.497.420.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	50 unit	4.497.420.600

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	497.420.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	497.420.600
5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Laporan	27.096.035.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Laporan	27.096.035.000
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.000.000.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96.035.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	96.035.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	53 Unit	82.434.350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	53 Unit	82.434.350
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	82.434.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	82.434.350
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	90,69%	42.693.699.293	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	90,69%	42.693.699.293

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
			Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	85,40%				Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	85,40%	
			Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	86,58%				Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	86,58%	
			Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	81,96%				Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	81,96%	
			Persentase Sosialisasi Keselamatan Perhubungan	85,07%				Persentase Sosialisasi Keselamatan Perhubungan	85,07%	
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	2862 Unit	35.148.681.650	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	2862 Unit	35.148.681.650

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
8.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1937 Unit	33.916.103.500	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1937 Unit	33.916.103.500
8.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	1.232.578.150	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	1.232.578.150
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C	2 Laporan	3.984.686.438	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C	2 Laporan	3.984.686.438
9.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg Kab. Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	3.984.686.438	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	3.984.686.438
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Laporan	199.685.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Laporan	199.685.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
10.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Garut Kota, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	199.685.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	199.685.000
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	12 Laporan	1.471.901.600	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	12 Laporan	1.471.901.600
11.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.196.901.600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.196.901.600
11.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	n 12 Dokume	75.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	75.000.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
11.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	200.000.000
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	12 Laporan	1.176.527.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	12 Laporan	1.176.527.000
12.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	508.391.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	508.391.000
12.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	39 Unit	605.148.000	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	39 Unit	605.148.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
12.3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	62.988.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	62.988.000
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	12 Laporan	485.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	12 Laporan	485.000.000
13.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	485.000.000	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	485.000.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan angkutan umum orang dan barang	2 Laporan	66.790.435	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyediaan angkutan umum orang dan barang	2 Laporan	66.790.435
14.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	66.790.435	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	66.790.435
15	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	78.549.170	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	78.549.170

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
15.1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	78.549.170	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	78.549.170
16	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	81.878.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	1 Dokumen	81.878.000
16.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul, Haurpangg	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	81.878.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	81.878.000

No.	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu RKPD 2023 Perubahan
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				36.155.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				36.155.000
17	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut	1 Laporan	36.155.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota				36.155.000
17.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.155.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.155.000
					92.085.046.564					92.085.046.564

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Prioritas pembangunan Nasional yang ditetapkan pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 bahwa fokus pembangunan dititik beratkan terhadap peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dengan kebijakan mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Kebijakan sebagaimana tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan kebijakan yang difokuskan untuk pembangunan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, *Major Project*, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas).

Hal tersebut didukung oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dengan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar kontinuitas serta keselarasan pembangunan dapat terjaga dengan baik. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan anggaran untuk program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan anggaran 2023.

Atas dasar pertimbangan ketersediaan anggaran, maka dinas perhubungan menyadari bahwa hal yang dapat dilakukan adalah berusaha menjaga hasil program kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dapat terpelihara dengan baik. Salah satu yang dilakukan adalah mengajukan tambahan anggaran untuk pembayaran rekening listrik PJU dengan alasan adanya penambahan jumlah PJU yang cukup banyak dari bantuan khusus keuangan provinsi Jawa Barat.

Selain itu pula ada kegiatan rutin berupa even nasional dan regional yang akan dihadapi pada akhir tahun yaitu pengamanan natal dan tahun baru.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 tetap berpedoman dari tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 yaitu Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dasar (Perhubungan) dan Pelayanan Perhubungan yang Merata dan Berkualitas.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
					2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas		Tingkat ketersediaan sarana prasarana perhubungan, fasilitas perlengkapan jalan, angkutan umum yang beroperasi, penyuluhan keselamatan lalulintas dan angkutan dan laik layar sarana pelayaran	%	87,63
		Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	90,69
			Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	85,99
		Meningkatnya pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	%	81,96
			Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan	%	85,07
			Tingkat laik layar sarana pelayaran	%	94,44

Dalam Perubahan RPJMD Kab. Garut tahun 2019-2024 dinas perhubungan termasuk kedalam misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Apabila dikaitkan dengan aspek pelayanan umum urusan perhubungan (IKK urusan perhubungan) penyediaan sarana prasarana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja IKK urusan perhubungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah, Dinas perhubungan dalam melaksanakan program kegiatan perubahan berusaha untuk tetap menyelaraskannya dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 serta Renstra Perubahan Tahun 2019-2024. Fokus pembangunan tetap pada penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai demi tercapainya kinerja Misi III Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Adapun faktor utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah seperti :

- a. Pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang melalui peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian dengan menyediakan infrastruktur dasar perhubungan dan pelayanan perhubungan yang merata dan berkualitas;
- b. Untuk pencapaian SDGs, Dinas Perhubungan berperan secara tidak langsung dalam 17 tujuan SDGs seperti dalam penanganan perubahan iklim dimana Dinas Perhubungan memiliki pelayanan yang berkaitan dengan uji emisi kendaraan bermotor;

- c. Untuk pengentasan kemiskinan Dinas Perhubungan berupaya menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi ke wilayah terpencil seta pemulihan perekonomian dari sektor transportasi;
- d. Dalam pendayagunaan potensi ekonomi daerah Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan penyediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor, potensi parkir dan terminal dll.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 meliputi tiga program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Indikator Program :

- 1) Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan;
 - 2) Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas;
 - 3) Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU);
 - 4) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum;
 - 5) persentase sosialisasi keselamatan perhubungan.
3. Program Pegelolaan Pelayaran;

Indikator Program :

- 1) Persentase sarana pelayaran yang laik layar.

Perubahan anggaran yang diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan direkomendasikan oleh TAPD Kab. Garut merupakan program kegiatan prioritas 1 yang meliputi meliputi :

1. Penambahan pembayaran rekening listrik PJU dari 23.000.000.000,- menjadi 27.000.000.000,- atau bertambah sebesar 4.000.000.000 dengan alasan Adanya Pembangunan PJU T.A 2023 sebanyak 1.937 titik (dari DAU dan BKK Provinsi Jawa Barat);

2. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 60.530.000,- untuk Operasional pemeliharaan PJU serta belanja sparepart PJU;
3. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 117.873.600.- untuk menutupi kekurangan anggaran untuk penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Alasan kekurangan karena pada perubahan parsial 2 mengalami efisiensi anggaran.

Adapun matriks rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Tahun 2023 sebagaimana tersaji berikut di bawah ini :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	1 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										52.822.846 .891	92.085.046 .564			64.951.313 .075			
2	1 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										46.165.357 .913	49.355.192 .271			-			
2	1 5	0 1	2.0 1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										25.000.000	21.130.120			25.000.000			
2	1 5	0 1	2.0 1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penyusuna n Dokumen Penganggar an Evaluasi Kinerja	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	7 Doku men	7 Doku men	7 Lapora n	7 Lapora n	25.000.000	21.130.120	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	100 %	25.000.000
2	1 5	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										17.662.194 .563	16.938.554 .141			17.663.900. 000			
2	1 5	0 1	2.0 2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatn ya Kinerja ASN Dinas Perhubung an	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	162 Orang /bu	162 Orang /bu	30 orang	430 orang	13.813.594. 563	13.089.954. 141	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil		Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	100 %	14.980.000. 000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah										
2	1 5	0 1	2.0 2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatn ya Kinerja ASN Dinas Perhubung an	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	1 Doku men	1 Doku men	430 orang	430 orang	3.848.600.0 00	3.848.600.0 00	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	100 %	2.683.900.0 00
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											130.000.00 0	127.127.50 0			308.000.00 0	
2	1 5	0 1	2.0 5	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatn ya ASN Dinas Perhubung an Kab. Garut yang dibina	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	8 Orang	8 Orang	108 orang	108 orang	80.000.000	80.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	100 %	170.000.00 0
2	1 5	0 1	2.0 5	1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Meningkatn ya ASN Dinas Perhubung an Kab. Garut yang dibina	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	108 orang	108 orang	50.000.000	47.127.500	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han - Dishub	100 %	138.000.00 0
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah											672.273.40 0	592.490.56 0			515.000.00 0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
										Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah							
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatn ya pelaksanaa n Administras i Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Lapora n	12 Lapora n	41.572.100	41.572.100	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	100 %	25.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatn ya pelaksanaa n Administras i Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Lapora n	12 Lapora n	75.000.000	75.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	100 %	100.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatn ya pelaksanaa n Administras i Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Lapora n	12 Lapora n	47.736.600	40.576.260	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	100 %	45.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatn ya pelaksanaa n Administras i Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	12 Lapora n	12 Lapora n	205.000.000	205.000.000	Dana Transfe r Umum- Dana Bagi Hasil	Persentas e Pemenuh an Kebutuha n Penunjan g Urusan Pemerinta han – Dishub	100 %	125.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah							
2 1 0 2.0 0 5 1 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	10.000.000	
2 1 0 2.0 0 5 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	292.964.700	220.342.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	210.000.000	
2 1 0 2.0 0 5 1 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											4.497.420.600	4.497.420.600			4.750.000.000		
2 1 0 2.0 0 5 1 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	52 Unit	45 Unit	53 unit	53 unit	497.420.600	497.420.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	250.000.000	
2 1 0 2.0 0 5 1 7 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	53 unit	53 unit	4.000.000.000	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	100 %	4.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah										
		Pemerintah – Dishub															Pemerintah – Dishub				
2	1	0	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											23.096.035.000	27.096.035.000			25.024.035.000		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	23.000.000.000	27.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	25.000.000.000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	96.035.000	96.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	24.035.000
2	1	0	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											82.434.350	82.434.350			140.000.000		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	100 %	53 Unit	53 Unit	53 Unit	53 Unit	82.434.350	82.434.350	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	100 %	140.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah										
	Dinas Operasional atau Lapangan	Pemerintahan – Dishub	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	yang dipelihara													Pemerintahan – Dishub				
2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											6.607.488.978	42.693.699.293			16.375.378.075	
2	1	0	2.0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											2.560.912.740	35.148.681.650			3.300.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Meningkatnya PJU yang terbangun dan terpelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	85,40 %	85,40 %	125 Unit	1937 Unit	925 Unit	2862 Unit	1.348.360.000	33.916.103.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	854,00 %	1.800.000.000
2	1	0	2.0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Meningkatnya PJU yang terbangun dan terpelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	85,40 %	85,40 %	800 Unit	800 Unit	925 Unit	2862 Unit	1.212.552.740	1.232.578.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	854,00 %	1.500.000.000
2	1	0	2.0	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											463.203.938	3.984.686.438			3.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah							
2 1 0 2.0 0 5 2 3 3	Pengembang an Sarana dan Prasarana Terminal	Persentas e ketersedi aan sarana prasaran a dan fasilitas perhubun gan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembang an	Tersusunnya a Laporan pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung Kab. Garut Bayongbo ng Mulyasari	90,69 %	90,69 %	1 Unit	2 Unit	1 Lapora n	2 Lapora n	463.203.938	3.984.686.4 38	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Bantua n Keuang an Khusus dari Pemerin tah Daerah Provinsi	Persentas e ketersedi aan sarana prasaran a dan fasilitas perhubun gan	9069,0 0 %	3.500.000.0 00	
2 1 0 2.0 0 5 2 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										200.000.00 0	199.685.00 0			200.000.00 0			
2 1 0 2.0 0 5 2 4 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Pembanguna n Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentas e ketersedi aan sarana prasaran a dan fasilitas perhubun gan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar aan dan Terbangunny a Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/K ota	Tersusunnya a laporan Penerbitan Izin Penyelengg araan dan Pembangun an Fasilitas Parkir	Kab. Garut Kota Semua Kelurahan	90,69 %	90,69 %	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	200.000.000	199.685.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas e ketersedi aan sarana prasaran a dan fasilitas perhubun gan	9069,0 0 %	200.000.00 0	
2 1 0 2.0 0 5 2 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										1.475.000. 000	1.471.901. 600			4.843.778. 075			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah							
2 1 0 2 0 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Tersedianya laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	90,69 %	90,69 %	1 Unit	1 Unit	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000	1.196.901.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	4.218.778.075	
2 1 0 2 0 5	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	90,69 %	90,69 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	375.000.000	
2 1 0 2 0 5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Tersedianya laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	90,69 %	90,69 %	11 Unit	11 Unit	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	250.000.000	
2 1 0 2 0 5	0 2 0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										1.185.113.000	1.176.527.000			2.682.000.000		
2 1 0 2 0 5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	86,58 %	86,58 %	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	508.391.000	508.391.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	1.057.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah											
				Kabupaten																		
2	1 5	0 2	2.0 6	0 2	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya laporan pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	86,58 %	86,58 %	39 Unit	39 Unit	12 Laporan	12 Laporan	606.600.000	605.148.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	1.200.000.000
2	1 5	0 2	2.0 6	0 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	86,58 %	86,58 %	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.122.000	62.988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	125.000.000
2	1	0	2.0	8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										485.000.000	485.000.000			1.194.600.000			
2	1 5	0 2	2.0 8	0 4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Tersedianya laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	85,07 %	85,07 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	485.000.000	485.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	8507,00 %	611.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah										
	Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
2	1 5	0 2	2.0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															350.000.000	
2	1 5	0 2	2.0 9	0	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan penyediaan angkutan umum orang dan barang	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	81,96 %	81,96 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	69.259.300	66.790.435	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	8196,00 %	350.000.000
2	1 5	0 2	2.1 0		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															125.000.000	
2	1 5	0 2	2.1 0	0	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan	Tersedianya dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	81,96 %	81,96 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	84.500.000	78.549.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	8196,00 %	125.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah											
	ota		Kewenangan Kabupaten/K ota																			
2	1 5	0 2	2.1 2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											84.500.000	81.878.000			180.000.000		
2	1 5	0 2	2.1 2	0	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentas e peningkat an pelayana n angkutan umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/K ota	Tersedianya dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpang gung	81,96 %	81,96 %	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	84.500.000	81.878.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e peningkat an pelayana n angkutan umum	8196,0 0 %	180.000.000
2	1 5	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											50.000.000	36.155.000			150.000.000		
2	1 5	0 3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota											50.000.000	36.155.000			150.000.000		
2	1 5	0 3	2.0 1	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentas e laik layar sarana pelayaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/K ota	Meningkatn ya pelaksanaa n pengawasa n keselamata n angkutan laut	Kab. Garut Pameungp euk Pameungp euk	94,44 %	94,44 %	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	50.000.000	36.155.000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e laik layar sarana pelayaran	9444,0 0 %	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Cata ta n Pent in g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebel um	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah	Sebelu m	Sesud ah							
TOTAL											52.822.846	92.085.046			64.951.313.			
											.891	.564			075			

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kebutuhan maka Dinas Perhubungan mengambil kebijakan:

- a. Mengajukan kembali program kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya;
- b. Menggeser alokasi anggaran dari sub kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya untuk diajukan kembali pada tahun anggaran selanjutnya;
- c. Berinovasi untuk mencapai target kinerja dengan tidak bertumpu pada ketersediaan anggaran.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini disusun melalui tahapan serta proses yang terukur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik dalam proses penyusunannya maupun dalam proses lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran perubahan 2023.

Sebagai tindak lanjut atas Perubahan Renja Tahun 2023 agar berjalan sesuai dengan rencana maka kebijakan yang diambil adalah :

- a. Mengintegrasikan Perubahan RKA 2023 ke Aplikasi SIRUP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Menyusun rencana kinerja dan Rencana aksi Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- c. Mendorong para pejabat pengadaan dan pengelola kegiatan agar bersinergi dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya.

Akhirnya semoga perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat berhasil dan berdaya guna serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN